

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

DKI Bayarkan Uang Pangkal Siswa di Sekolah Swasta

Anies Baswedan meminta kajian penyaluran bantuan bagi seluruh siswa yang gagal dalam PPDB 2020.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta mengkaji kemungkinan mengambil alih tanggung jawab pembayaran uang pangkal masuk sekolah swasta bagi seluruh anak yang gagal dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Gubernur Anies Baswedan menilai pemerintah harus memastikan seluruh anak usia sekolah di Ibu Kota bisa menempuh pendidikan di sekolah.

"Biaya pendidikan memang mahal. Tapi, kalau ada orang tak bersekolah dan tak terdidik, ongkosnya lebih mahal lagi bagi negara ke depannya," kata Anies dalam rapat pimpinan di Balai Kota, akhir pekan lalu.

Hal ini disampaikan Anies saat menerima pemaparan Dinas Pendidikan DKI tentang nasib 126.011 anak yang terdampak dari seleksi PPDB 2020. Berdasarkan data DKI, sebagian besar dari mereka bahkan belum menemukan sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Dinas Pendidikan ingin meringankan beban orang tua dengan mengambil alih secara penuh biaya uang pangkal masuk sekolah swasta.

Meski demikian, Dinas Pendidikan hanya bisa mengalokasikan anggaran Rp 171,06 miliar bagi 85.508 anak yang terdaftar dalam keluarga penerima bantuan sosial pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dana ini akan ditransfer ke rekening sekolah privat tujuan dengan pembagian Rp 1 juta per siswa untuk uang pangkal tingkat sekolah dasar (SD), Rp 1,5 juta untuk sekolah menengah pertama (SMP), dan Rp 2,5 juta untuk sekolah menengah atas atau kejuruan (SMA/SMK).

Menurut Anies, DKI bisa menyediakan dana bagi 40.503 anak yang tak masuk daftar penerima bansos Covid-19. Menurut dia, penyaluran dana uang pangkal hingga Rp 247,37 miliar ini bisa menggunakan anggaran bantuan tak terduga (BTT) atau dana darurat Covid-19. "Semua yang masuk swasta kasih saja. Rakyat juga bisa tenang, tak perlu surat miskin dan macam-macam," ujar dia. "Tapi pastikan apakah besarnya memang Rp 1-2,5 juta."

Asisten Sekretariat Daerah DKI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Catur Laswanto, mengatakan bantuan uang pangkal ini bisa diajukan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 pada bulan depan. Dia menilai pemerintah provinsi tak berada dalam situasi mendesak untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut ke sekolah swasta. Hal ini merujuk pada kesepakatan Dinas Pendidikan dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) tentang penundaan penagihan uang pangkal sekolah swasta kepada siswa yang baru masuk sekolah. "Bisa dibebankan pada APBD Perubahan 2020 karena swasta sudah memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran," kata Catur.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI, Edi Sumantri, Jakarta dapat menyalurkan dana uang pangkal menggunakan anggaran BTT sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, belanja penanganan Covid-19 bisa dialokasikan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Namun, Edi melanjutkan, anggaran bantuan tak terduga hanya bisa diberikan kepada anak dari keluarga prasejahtera dan yang terkena dampak

Covid-19 atau sesuai dengan daftar penerima bantuan sosial. "Pemberian bansos kemudian bisa diartikan dapat berupa barang atau uang," ujar dia.

Soal besaran kebutuhan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana mengatakan masih menunggu kepastian angka uang pangkal dari BMPS. Menurut dia, angka Rp 1-2,5 juta berasal dari perkiraan rata-rata saat Dinas Pendidikan menggelar rapat dengan BMPS, pekan lalu. "Ada juga yang mencapai Rp 4 juta. Karena sekolah swasta itu banyak jenisnya, ada yang kelas atas, menengah, dan bawah," kata dia.

Ketua Umum BMPS, Imam Parikesit, mengatakan sekolah swasta di DKI Jakarta memiliki banyak kategori dengan jangkauan nominal uang pangkal yang sangat luas. Menurut dia, belum tentu semua sekolah swasta bersedia ikut dalam program pembiayaan uang pangkal tersebut. BMPS, dia melanjutkan, tengah berkomunikasi dengan seluruh kepala sekolah swasta, terutama yang memiliki rata-rata uang pangkal sesuai dengan perhitungan Pemprov DKI.

"Selasa (hari ini) saya akan berkomunikasi dengan seluruh kepala SMA swasta. Lalu, Kamis dengan seluruh kepala SMP swasta," kata Imam. "Saya optimistis banyak yang mau mendukung program Pemprov DKI." • FRANCISCO ROSARIANS